

## ABSTRAK

Agung Darmawan, NPM 208010052, Evaluasi Kebijakan Impor Daging Kerbau Di Kota Bandung dengan Pembimbing Prof. Dr.R Taqwaty Firdausijah M.Si. dan Co. Pembimbing Dr. Achdiat M.Si.

Peran pangan termasuk pangan asal ternak begitu besar sebagai bahan makanan, sumber mata pencaharian, kegiatan perekonomian, perdagangan, Salah satu produk subsektor peternakan yang mampu menyediakan bahan pangan adalah daging sapi dan Kerbau. Penelitian ini perlu dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan impor daging kerbau di Kota Bandung memberikan dampak yang luas bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Metode Penelitian yang digunakan deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan Kualitatif untuk mengetahui kondisi yang sesungguhnya dari para objek penelitian dengan secara murni tanpa ada campur tangan peneliti. Teknik pengumpulan data dengan melakukan Observasi dan wawancara mendalam. Sumber data penelitian meliputi sumber data primer dan sekunder dengan pengumpulan data melalui observasi, studi pustaka, wawancara. Adapun teknik pengolahan data dengan reduksi data, display dan verifikasi.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tujuan dari kebijakan impor daging kerbau dikota Bandung khususnya telah terlaksana dengan baik, namun dalam hal mekanisme harga pasar harus ada regulasi yang ketat yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga Faktor dominan yang menyebabkan belum optimalnya kebijakan impor daging kerbau di kota Bandung adalah kurang sosialisasinya daging kerbau ini. Sehingga yang terjadi banyaknya para pedagang yang nakal menjual daging kerbau menjadi daging sapi dan harga dagingnya pun tidak jauh beda dengan harga daging sapi.

**Kata Kunci : Evaluasi, dampak kebijakan, mekanisme harga, impor daging kerbau**

## ABSTRACT

Agung Darmawan, NPM 208010052, Evaluation of Buffalo Meat Import Policy in Bandung City with Supervisor Prof. Dr.R Taqwaty Firdausijah M.Si. and Co. Supervisor Dr. Achdiat M.Sc.

The role of food originating from livestock is enormous as a food ingredient, source of livelihood, economic activity, trade. One of the livestock subsector products that is able to provide food is beef and buffalo meat. This research needs to be carried out to determine the extent to which the buffalo meat import policy in Bandung City has had a broad impact on society, both directly and indirectly.

The research method used is descriptive analysis using a qualitative approach to determine the true condition of the research objects purely without any intervention from researchers. Data collection techniques include observation and in-depth interviews. Research data sources include primary and secondary data sources with data collection through observation, literature study, interviews. The data processing techniques include data reduction, display and verification.

The results of the research conclude that the objectives of the buffalo meat import policy in the city of Bandung in particular have been implemented well, but in terms of market price mechanisms there must be strict regulations carried out by the government. So the dominant factor that causes the buffalo meat import policy to not be optimal in Bandung City is the lack of socialization of buffalo meat. So there are many naughty traders selling buffalo meat for beef and the price of the meat is not much different from the price of beef.

**Keywords: Evaluation, policy impact, price mechanism, buffalo meat imports**

## ABSTRAK

Agung Darmawan, NPM 208010052, Evaluasi Kebijakan Impor Daging Kebo di Kota Bandung jeung Pembimbing Prof. Dr.R Taqwaty Firdausijah M.Si. jeung co. Pangawas Dr. Achdiat M.Sc.

Kalungguhan pangan nu asalna tina ingon-ingon kacida gedéna, boh salaku pangan, sumber mata pencaharian, kagiatan ékonomi jeung padagangan. Salah sahiji produk subsektor peternakan anu mampuh nyadiakeun pangan nyaéta daging sapi jeung daging kebo. Ieu panalungtikan téh perlu dilaksanakeun pikeun mikanyaho nepi ka mana kebijakan impor daging kebo di Kota Bandung mangaruhan kana masarakat, boh sacara langsung boh sacara teu langsung.

Métode panalungtikan anu digunakeun nyaéta analisis déskriptif kalawan pendekatan kualitatif pikeun nangtukeun kaayaan sabenerna objék panalungtikan sacara murni tanpa aya intervensi ti panalungtik. Téhnik ngumpulkeun data ngawengku observasi jeung wawancara jero. Sumber data panalungtikan ngawengku sumber data primer jeung sekunder kalayan ngumpulkeun data ngaliwatan observasi, studi pustaka, wawancara. Téhnik ngolah data ngawengku réduksi data, tampilan jeung verifikasi.

Hasil panalungtikan nyindekkeun yén tujuan kawijakan impor daging kebo di Kota Bandung hususna geus dilaksanakeun kalawan hadé, tapi dina hal mékanisme harga pasar kudu aya régulasi anu ketat anu dilaksanakeun ku pamaréntah. Jadi faktor dominan anu ngabalukarkeun kawijakan impor daging kebo teu optimal di Kota Bandung nyaéta kurangna sosialisasi daging kebo. Jadi loba pisan padagang bangor anu ngajual daging kebo pikeun dagingna jeung harga dagingna teu jauh beda jeung harga daging sapi.

**Kata Kunci: Evaluasi, dampak kawijakan, mekanisme harga, impor daging kebo**

**JURNAL**

**EVALUASI KEBIJAKAN IMPOR DAGING KERBAU DI KOTA  
BANDUNG**

**TESIS**

**Diajukan Dalam Rangka Memenuhi Syarat Ujian Tesis Guna Memperoleh Gelar Magister  
Administrasi Publik Pada Program Studi Magister Administrasi Dan Kebijakan Publik  
Konsentrasi Kebijakan Publik Program Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung**

**Oleh :**

**AGUNG DARMAWAN**

**208010052**



**PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN  
PUBLIK PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS  
PASUNDAN BANDUNG**

**Tahun 2024**

## **1. PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Manusia merupakan salah satu aset terpenting dalam pembangunan suatu bangsa. Dan kualitas manusia menjadi hal yang harus diperhatikan, karena dengan kualitas manusia yang baik maka bangsa ini menjadi bangsa yang dapat diperhitungkan oleh bangsa lain termasuk bisa mewujudkan peranannya sebagai masyarakat yang dapat diandalkan oleh bangsa sendiri melalui berbagai potensi yang dimilikinya. Kebutuhan dasar manusia sendiri adalah pangan, karena itu pemenuhan atas pangan yang cukup, bergizi dan aman menjadi hak asasi setiap manusia untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas guna melaksanakan pembangunan Nasional. Sebagai usaha pemenuhan kebutuhan hidupnya, manusia selalu berusaha untuk mencari dan menghasilkan yang terbaik.

Berdasarkan isi Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan, pangan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan pembuatan makanan atau minuman. Sumber protein hewani yang dibutuhkan oleh masyarakat berasal dari subsektor peternakan sehingga berpengaruh besar dalam pemenuhan kebutuhan pangan.

Menyikapi hal tersebut, melalui SK Mentan No. 2556/2016 pada 8 Juni 2016 importasi daging kerbau beku dibolehkan masuk ke negeri ini dan keputusan Menteri Perdagangan sesuai dengan PERMENDAG No. 59/M-DAG/PER/8/2016 tentang ketentuan Ekspor dan Import hewan dan produk ternak. Kemudian menugaskan BULOG melalui surat No. B1360/ 2020 untuk meng impor daging kerbau ke indonesia yang berasal dari india. India dipilih karena india merupakan negara pemasok daging kerbau terbesar di seluruh dunia. Berdasarkan data survey Susenas 2020 diketahui bahwa persentase pengeluaran rata-rata perkapita sebulan yang digunakan untuk kebutuhan makanan sekitar (49.2%). Angka ini menunjukkan bahwa makanan merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia. Daging merupakan sumber utama protein hewani. Kebutuhan akan daging untuk konsumsi masyarakat dari tahun ke tahun selalu meningkat seiring dengan semakin banyaknya jumlah penduduk di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepadatan penduduk berkorelasi positif dengan tingkat kebutuhan produk ternak (daging). Harus diakui, bahwa produk pangan asal ternak sangat penting untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, sehingga disinilah peran strategis keberadaan ternak potong, karena Permintaan terhadap produk-produk untuk pemenuhan gizi seperti produk daging sapi meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia.

Salah satu solusi yang diambil oleh pemerintah untuk memperbaiki defisit daging sapi adalah dengan membuka keran impor daging kerbau yang harganya jauh

lebih murah dibandingkan daging sapi lokal dan impor. India dipilih karena india merupakan negara pemasok daging kerbau terbesar di seluruh dunia. Pada bulan juli 2016, bulog menyatakan bahwa pada tahap awal akan masuk 9000 Ton daging kerbau yang akan dijual dengan harga Rp 60.000/kg. sedangkan pada bulan juli 2016 harga daging sapi masih berkisar Rp 80.000/kg sampai dengan Rp 120.000/kg. oleh karena itu, dengan adanya impor daging kerbau dari india diharapkan masyarakat dapat menjadikan daging kerbau sebagai substitusi dari daging sapi, sehingga dapat menekan permintaan terhadap daging sapi sehingga daging sapi dapat turun.

Konsumen daging sapi yang sekitar 16% berada pada segmentasi kelompok masyarakat menengah atas. Konsumen kelompok ini tidak terganggu oleh harga daging kerbau beku yang murah, karena preferensinya terhadap daging sapi. Selain itu, kita pun mengetahui bahwa elastisitas permintaan daging sapi lebih besar dari satu, sehingga makin tinggi pendapatan konsumen, konsumsi akan daging sapi akan meningkat. Sesungguhnya, yang menginginkan importasi daging kerbau adalah industri pemrosesan daging, karena mereka mendapatkan harga daging sapi lokal sebagai bahan baku yang mahal harganya. Namun, realisasi importasi daging kerbau pun ternyata bermasalah bagi industri pengolahan daging. Pasalnya, adanya tuntutan transparansi bagi pengolahan produk yang dihasilkannya. Misalnya, bakso daging sapi yang biasa dikonsumsi masyarakat harus disebutkan sebagai bakso daging kerbau jika bahan bakunya menggunakan daging kerbau.

Dampak dari Kebijakan SK Mentan No. 2556/2016 pada 8 Juni 2016 tentang importasi daging kerbau beku dibolehkan masuk ke negeri ini. Beberapa dampak kebijakan dari program importasi daging kerbau beku yang dilakukan pemerintah diantaranya :

1. Pemotongan sapi lokal di rumah pemotongan hewan (RPH) di sekitar wilayah Bandung maupun daerah lainnya menurun tajam. Hal ini didukung oleh hasil kajian bahwa importasi daging kerbau asal India hanya menguntungkan peternak di India dan pelaku tata niaga.
2. Dampak kebijakan pemerintah mengimpor daging kerbau, mengakibatkan ketidakmandirian peternak sapi lokal. Peternak sapi lokal menjadi bergantung pada daging kerbau impor. Peternak sapi lokal Indonesia umumnya memiliki sifat pemalas.
3. Dengan adanya produk baru yaitu daging kerbau maka perlu adanya edukasi kepada pedagang pengecer dan konsumen. Pedagang perlu diedukasi terkait higienitas produk dan keterbukaan (kejujuran) informasi produk kepada konsumen.
4. Tidak ada regulasi yang jelas dan Persaingan tidak sehat karna importir bisa langsung menjual ke end user.

Oleh karena itu, kebijakan yang dilakukan pemerintah terkait impor daging kerbau di indonesia perlu di evaluasi. Evaluasi kebijakan dalam perspektif alur proses atau siklus kebijakan publik, menempati posisi terakhir setelah implementasi



kebijakan, sehingga sudah sewajarnya jika kebijakan publik yang telah dibuat dan dilaksanakan lalu di evaluasi. Dari evaluasi akan diketahui keberhasilan atau kegagalan dari sebuah kebijakan, sehingga secara normatif akan diperoleh rekomendasi apakah kebijakan dapat dilanjutkan atau perlu perbaikan sebelum dilanjutkan atau bahkan dihentikan.

### **Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah tentang Evaluasi kebijakan impor daging kerbau yang berasal dari india. Dengan menggunakan teori Thomas R. dye.

### **Perumusan Masalah**

Kebutuhan manusia akan protein hewani tidak bisa dihindari. Semakin produktif manusia akan semakin membutuhkan asupan gizi yang memadai. Oleh sebab itu permintaan terhadap daging akan selalu ada. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan impor daging kerbau india. Tetapi kebijakan ini tidak sepenuhnya diterima secara terbuka oleh masyarakat di indonesia. Timbul berbagai pro-kontra mengenai kebijakan ini. Terdapat berbagai wilayah yang dijadikan target impor daging kerbau, dan salah satunya adalah daerah Bandung. Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan impor daging kerbau di Kota Bandung?

## 2. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERFIKIR DAN PROPOSISI

Kajian pustaka merupakan literatur yang menggambarkan konsep dan teori maupun hasil penelitian yang relevan dengan fokus penelitian. Oleh karena itu, sebelum membahas mendalam tentang teori yang akan peneliti bahas maka peneliti akan mengemukakan salah satu jurnal dan beberapa hasil penelitian terdahulu yang mendukung guna memberikan gambaran awal dan dapat menjadi rujukan dan penguatan tentang konsep permasalahan yang diteliti. Peneliti pada bagian ini memaparkan terlebih dahulu hasil penelitian terdahulu yang ada relevasinya dengan penelitian peneliti, yaitu dari penelitian sebagai berikut :

### **Konsep Administrasi Publik**

Pengertian kata administrasi bila diuraikan menurut asal katanya, *ad* berarti intensif dan *ministrare* berarti melayani, membantu, memenuhi. Secara etimologis administrasi berarti melayani kegiatan secara intensif. Kata administrasi selain kata kerja, juga dapat diartikan sebagai kata sifat *administrativus* dan kata benda *administratio*. Adapun pengertian administrasi dalam bahasa indonesia, dibagi dalam dua pengertian yaitu administrasi dalam arti sempit dan administrasi dalam arti luas. Administrasi dalam arti sempit memiliki pengertian sebagai kegiatan-kegiatan dalam ketatausahaan, yang terdapat pada tata usaha kantor, tata usaha warkat, kegiatan tulis menulis, *clerical work*, pengertian ini didapat dari definisi kata “*administratie*” dalam bahasa belanda. Sedangkan administrasi dalam arti luas dapat dilihat dari

pengertian bahasa inggris "*administration*" yaitu segala kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dan bekerjasama secara rasional untuk mencapai tujuan bersama. Pengertian-pengertian administrasi yang lainnya banyak dijelaskan oleh para ahli diantaranya adalah Simon dalam st.Dianjung (1999:13) Yang menyatakan: "administrasi dapat dirumuskan sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama". Pendapat ini memiliki pengertian bahwa administrasi bukan merupakan kegiatan individu yang mandiri, namun merupakan kegiatan yang melibatkan banyak individu atau kelompok, karena administrasi menyangkut kerjasama yang dibangun untuk mewujudkan atau mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

### **Konsep Kebijakan Publik**

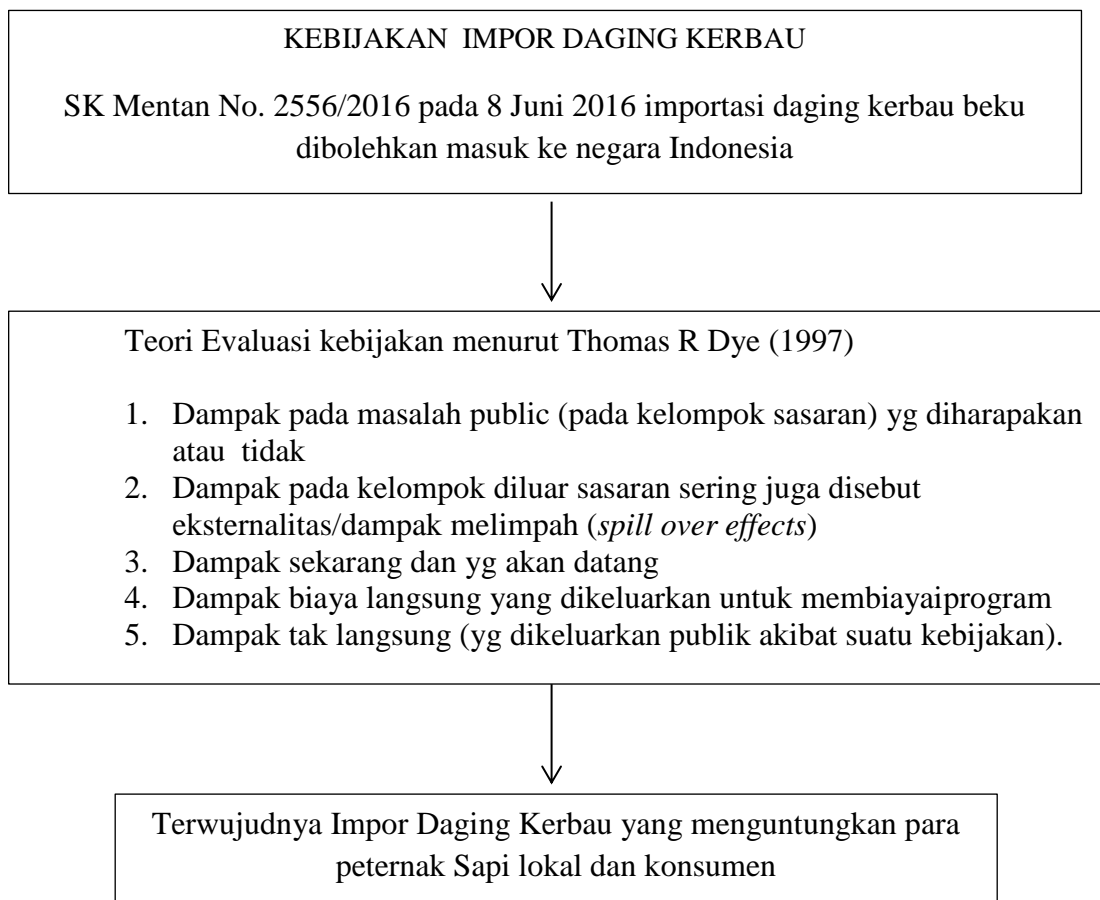
Kebijakan publik menurut Thomas R. Dye (dikutip dalam Islamy, 2007 : 18) adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan pemerintah disamping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Definisi kebijakan publik dari Thomas R. Dye tersebut mengandung makna bahwa kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta dan kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. James E. Anderson (dikutip dalam Islamy, 2007 : 19) mengartikan kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang

dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat pemerintah. Menurut Anderson, implikasi dari pengertian kebijakan publik tersebut adalah : (1) bahwa kebijakan publik itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan, (2) bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah, (3) bahwa kebijakan itu adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, (4) bahwa kebijakan publik itu bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu, dan (5) bahwa kebijakan publik setidaknya dalam arti yang positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa.

### **Konsep Evaluasi Kebijakan**

Evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak (Anderson: 1975). Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan kepada seluruh proses kebijakan. Menurut W. Dunn, istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Evaluasi mencakup : kesimpulan, klarifikasi, kritik, penyesuaian dan perumusan masalah kembali.

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat dideskripsikannya pada gambar 2.3 sebagai berikut :



### **Proposisi Penelitian**

Proposisi adalah istilah yang digunakan untuk kalimat pernyataan yang memiliki arti penuh dan utuh. Hal ini berarti suatu kalimat harus dapat dipercaya, disangsikan, disangkal atau dibuktikan benar tidaknya. Berangkat dari rumusan masalah dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan sebelumnya, maka proposisi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Munculnya dampak dari evaluasi kebijakan Impor Daging Kerbau di kota Bandung.
2. Kebijakan Impor Daging Kerbau di Bandung akan optimal. Dengan memperhatikan dampak evaluasi kebijakan menurut Thomas R Dye yaitu (1) Dampak pada masalah public (pada kelompok sasaran) yg diharapkan atau tidak (2) Dampak pada kelompok diluar sasaran sering juga disebut eksternalitas/dampak melimpah (*spill over effects*) (3) Dampak sekarang dan yg akan datang (4) Dampak biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program (5) Dampak tak langsung (yg dikeluarkan publik akibat suatu kebijakan).

### **3. OBJEK DAN METODE PENELITIAN**

#### **Sekilas Tentang Sejarah Perum BULOG**

Perjalanan Perum BULOG dimulai pada saat dibentuknya BULOG pada tanggal 10 Mei 1967 berdasarkan keputusan presidium kabinet No.114/U/Kep/5/1967, dengan tujuan pokok untuk mengamankan penyediaan pangan dalam rangka menegakkan eksistensi Pemerintahan baru. Selanjutnya direvisi melalui Keppres No. 39 tahun 1969 tanggal 21 Januari 1969 dengan tugas pokok melakukan stabilisasi harga beras, dan kemudian direvisi kembali melalui Keppres No 39 tahun 1987, yang dimaksudkan untuk menyongsong tugas BULOG dalam rangka mendukung pembangunan komoditas pangan yang multi komoditas. Perubahan berikutnya dilakukan melalui Keppres No. 103 tahun 1993 yang memperluas tanggung jawab BULOG mencakup koordinasi pembangunan pangan dan meningkatkan mutu gizi pangan, yaitu ketika Kepala BULOG dirangkap oleh Menteri Negara Urusan Pangan.

#### **Metode yang digunakan**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penggunaan metode semacam ini didasarkan pada pertimbangan bahwa metode ini ditunjukkan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan serta mengkaji secara kualitatif bagaimana Evaluasi Kebijakan Impor Daging Kerbau di Kota Bandung. Seluruh data dan

informasi diperoleh langsung dari informan di lapangan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan observasi partisipasi.

### **Teknik Pengumpulan Data dan Definisi Operasional Parameter**

Ada dua jenis data yang penulis butuhkan dalam penelitian ini, yaitu:

#### **Data Primer**

Data primer adalah kata-kata dan tindakan informan yang diamati atau diwawancarai yang dapat melalui catatan tertulis atau melalui rekaman video/audio tapes, pengambilan foto atau film (Moleong, 2006:157). Teknik pengumpulan data primer adalah sebagai berikut.

a. Observasi

Kegiatan Observasi meliputi melakukan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin. Tahap selanjutnya, peneliti harus melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang diperlukan sehingga peneliti dapat menemukan pola-pola perilaku dan hubungan yang terus-menerus terjadi (Sarwono, 2006:224).

b. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam adalah percakapan dengan maksud tertentu.



Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara tersebut mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain (Moleong, 2006:186). Adapun informan yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Direktur Suplay chain dan pelayanan publik
- 2) Divisi pengadaan pangan
- 3) Divisi Pengadaan Barang dan jasa

Peneliti melakukan wawancara dipandu dengan pedoman wawancara (*interview guide*) dan dibantu alat perekam suara (*Tape Recorder*), alat pencatat (buku dan pena). Semua informasi dicatat secara teliti dan selalu dikonfirmasi ulang apabila masih ada yang kurang jelas.

### **Data Sekunder**

Data sekunder merupakan bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi (Moleong, 2006:159). Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi, yaitu melakukan pengumpulan data dengan mengumpulkan buku, jurnal atau sumber-sumber ilmiah lainnya yang berkaitan dengan evaluasi kebijakan.

Operasionalisasi konsep merupakan pembatas pengertian tentang suatu konsep. Konsep atau pengertian ini merupakan unsur pokok dari suatu penelitian

untuk menghindari adanya penafsiran yang berbeda, maka dari masing-masing variabel secara konseptual dapat dirumuskan sebagai berikut Evaluasi Kebijakan Impor Daging Kerbau di Bandung harus memenuhi kriteria : Dampak pada masalah public (pada kelompok sasaran) yg diharapkan atau tidak, Dampak pada kelompok diluar sasaran sering juga disebut eksternalitas/dampak melimpah (*spill over effects*), Dampak sekarang dan yang akan datang, Dampak biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program dan Dampak tak langsung (yang dikeluarkan publik akibat suatu kebijakan).

### Oprasional Parameter Penelitian

Fokus Penelitian	Dimensi Evaluasi Kebijakan	Indikator
Evaluasi Kebijakan	1. Dampak atas kelompok sasaran/lingkungan	a. Dampak pada masalah di masyarakat b. Dampak pada sasaran seperti RPH, Distributor Daging
	2. Dampak atas kelompok lain ( <i>spillovers effects</i> )	a. Dampak terhadap kelompok diluar sasaran seperti unit organisasi lainnya b. Dampak terhadap tujuan kebijakan
	3. Dampak atas masa depan	a. Dampak pada keadaan sekarang b. dampak pada masa yang akan datang - Ketergantungan impor - Usaha Peternak lesu
	4. Biaya Langsung	a. Biaya langsung yang dikeluarkan organisasi untuk membiayai program b Biaya yang diterima secara langsung oleh organisasi berkaitan dengan program
	5. Biaya Tidak langsung	a. Biaya tidak langsung yang masyarakat akibat adanya program b. biaya tidak langsung yang ditanggung oleh beberapa anggota masyarakat akibat adanya program

*Sumber : Thomas R dye (2002).*

#### Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleng (2006:248), adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan

apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain.

Proses pengolahan dan analisis data kualitatif dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut menurut Milles dan Huberman:

1. *Reduksi Data*

Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, mengabstrakkan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dimana setelah peneliti memperoleh data, harus lebih dulu dikaji kelayakannya dengan memilih data mana yang benar-benar dibutuhkan dalam penelitian ini.

2. *Display (Penyajian Data)*

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang disesuaikan dan diklarifikasi untuk mempermudah peneliti dan menguasai data dan tidak terbenam dalam setumpuk data.

3. *Verifikasi (Menarik Kesimpulan)*

Kesimpulan selama penelitian berlangsung makna-makna yang muncul dari data yang diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya sehingga diperoleh kesimpulan yang jelas kebenarannya dan kegunaannya.

### **Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data**

Untuk meningkatkan validitas data, dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi sumber, “Triangulasi sumber berarti mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama”

## **4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Evaluasi Kebijakan Impor Daging Kerbau di kota Bandung**

Indonesia dengan wilayahnya yang sangat luas dan jumlah penduduk yang sangat besar membutuhkan ketersediaan pangan dengan jumlah yang sangat besar pula. Untuk mengamankan pasokan dan ketersediaan pangan yang beragam jenisnya, mutlak perlu hadirnya Lembaga yang kokoh dan kuat, serta mampu menjangkau wilayah diseluruh tanah air, Perum BULOG telah teruji dan terpercaya dalam mengamankan pangan bangsa. Hal ini didukung oleh ketersediaan infrastruktur Perum BULOG. Untuk memperkuat daya dukung usaha, Perum BULOG juga bergiat mengembangkan Rumah Pangan Kita (RPK). Komitmen ini membuahkan kinerja positif. Yang tercermin dari kinerja keuangan yang membukukan pencapaian memuaskan.

Peran pangan termasuk pangan asal ternak begitu besar sebagai bahan makanan, sumber mata pencaharian, kegiatan perekonomian, perdagangan, bahan baku industri, sosial, budaya, serta politik. Karena vitalnya peran pangan dalam suatu negara sehingga pangan dikategorikan sebagai komoditi politik strategis (Daryanto

dalam Jiuhardi, 2016). Salah satu produk subsektor peternakan yang mampu menyediakan bahan pangan adalah daging sapi.

Berdasarkan isi Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan, pangan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan pembuatan makanan atau minuman. Sumber protein hewani yang dibutuhkan oleh masyarakat berasal dari subsektor peternakan sehingga berpengaruh besar dalam pemenuhan kebutuhan pangan.

. A. Kriteria Dampak pada masalah public (pada kelompok sasaran) yg diharapkan atau tidak.

Dampak kebijakan yang diharapkan pada kebijakan impor daging kerbau ini adalah untuk memberikan Solusi terhadap Masyarakat karna harga daging sapi yang mahal di pasaran dan pada akhirnya akan menciptakan daya beli Masyarakat secara merata dalam mengkonsumsi daging merah, karna oleh pemerintah daging kerbau dijual relative lebih murah harganya dibandingkan dengan harga daging sapi. Selain itu, dampak yang diharapkan adalah meningkatnya sektor bisnis rumahan atau pabrik karna harga hpp yang terbilang murah menggunakan bahan daging kerbau.

Sedangkan dampak yang tidak diharapkan yaitu para peternak lesu dan tidak bergairah dalam usahanya karna mengandalkan impor daging kerbau, kemudian ketidak terbukaan penjual dipasaran kalau yang mereka jual adalah daging kerbau.

B. Dampak pada kelompok diluar sasaran sering juga disebut eksternalitas/dampak melimpah (*spill over effects*)

Semua program dan kebijakan mempunyai dampak yang berbeda-beda pada berbagai segmen populasi. Mengidentifikasi kelompok non-sasaran yang penting untuk suatu kebijakan adalah proses yang sulit. Limbah kebijakan ini bisa positif atau bisa pula negative. Kebijakan impor daging kerbau ini menjadi tambahan pemasukan diluar pokok untuk para peternak sapi sehingga tidak perlu susah-susah untuk memelihara dan memotong sapi karna sudah tersedia dalam bentuk box-boxan sisi lain dampak negatifnya adalah berkurangnya jumlah sapi potong di RPH arjuna yang biasanya perbulan bisa 40-50 ekor, semenjak adanya impor daging kerbau atau daging beku pada umumnya 30-33 ekor perbulan pemotongan di RPH. Disisi lain juga dampak negative di luar kelompok sasaran yakni para pekerja di RPH dengan berat hati dikurangi orang-orangnya seperti tukang giring, tukang pakan, juru stuning, juru sembelih. Mereka semua di kurangi jatah kerjanya karna sepiunya para bandar sapi yang menyembelih hewan nya di RPH.

C. Dampak Jangka Pendek dan Efek jangka panjang kapan manfaat dan biayanya akan dirasakan? Adalah program yang dirancang untuk keadaan darurat

jangka pendek? Atau apakah ini merupakan upaya pembangunan jangka panjang? Jika pendek istilahnya, apa yang akan mencegah terjadinya proses inkrementalisme dan birokratisasi program jangka panjang, bahkan setelah program jangka pendek kebutuhan terpenuhi? Dampak kebijakan impor daging kerbau pada kondisi sekarang bisa berpengaruh pada kestabilan harga di pasaran. Sedangkan dampak pada jangka panjangnya akan berpengaruh pada mekanisme pasar dan makin lama kebijakan daging impor kerbau harga juga sudah tidak lagi murah bahkan harga bisa sama dengan harga daging sapi local.

D. Menghitung Manfaat Bersih dan Biaya Tugas menghitung dampak bersih terhadap masyarakat kebijakannya sungguh luar biasa. Itu semua manfaatnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dikurangi semua biaya, baik saat ini maupun di masa depan. Sekalipun semuanya biaya dan manfaat ini diketahui (dan semua orang menyepakati apa yang dimaksud dengan “manfaat” dan apa yang dimaksud dengan “biaya”), masih sangat sulit untuk menghasilkan saldo bersih. Menghitung biaya setiap rupiah dari sebuah kebijakan pemerintah relative lebih mudah dibandingkan dengan menghitung biaya-biaya lain yang bersifat kualitatif. Menghitung biaya impor daging jauh lebih mudah dibandingkan dengan menghitung dampak-dampak fisik, social dan ekonomi terhadap impor daging kerbau itu sendiri.

E. Dampak kebijakan terhadap biaya tidak langsung (*indirect cost*) seperti yang dialami oleh anggota-anggota Masyarakat. Seringkali biaya seperti ini jarang dinilai, hal ini Sebagian disebabkan karna sulitnya hal tersebut diukur. Begitu



sulitnya mengukur lebih cocok olahan daging sapi atau daging kerbau. Serta menurunnya kredibilitas pemerintah dalam hal ini dalam mengurangi ketergantungan barang-barang impor.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang evaluasi kebijakan impor daging kerbau di Kota Bandung, maka kesimpulan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kebijakan impor daging kerbau di kota Bandung dapat dinilai dengan menggunakan kriteria Dampak Evaluasi kebijakan dari teori Thomas R Dye yakni. Dampak pada masalah public (pada kelompok sasaran) yg diharapkan atau tidak. Dampak pada kelompok diluar sasaran sering juga disebut eksternalitas/dampak melimpah (*spill over effects*). Dampak sekarang dan yg akan datang. Dampak biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program. Dampak tak langsung (yg dikeluarkan publik akibat suatu kebijakan). Tujuan dari kebijakan impor daging kerbau dikota Bandung khususnya telah terlaksana dengan baik, namun dalam hal mekanisme harga pasar harus ada regulasi yang ketat yang dilakukan oleh pemerintah.

2. Implementasi Kebijakan impor daging kerbau di kota Bandung dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor dominan yang menyebabkan belum optimalnya kebijakan impor daging kerbau di kota Bandung adalah kurang sosialisasinya daging kerbau ini. Sehingga yang terjadi banyaknya para pedagang yang nakal menjual daging kerbau menjadi daging sapi dan harga dagingnya pun tidak jauh beda dengan harga daging sapi.

### **Saran-Saran**

Berdasarkan temuan penelitian, kajian teoritik dan kesimpulan tentang evaluasi kebijakan impor daging kerbau di Kota Bandung. Maka peneliti kemukakan beberapa saran yang dapat dijadikan rekomendasi baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang terkait dengan kajian ilmu kebijakan publik maupun rekomendasi bagi institusi dalam hal ini adalah Perum Bulog kota Bandung, antara lain :

### **Saran Akademik**

Kajian tentang evaluasi kebijakan secara teoritik sangat relevan dengan kajian ilmu kebijakan publik, oleh karena itu peneliti menyarankan agar para ilmunan dan praktisi yang terkait dengan kajian tersebut untuk lebih banyak melakukan penelitian yang bersifat *sustainable* agar dapat memberikan kontribusi pemikiran, khususnya dalam aspek pengembangan ilmu pengetahuan.

### **Saran Praktis**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor dominan yang menyebabkan belum optimalnya kebijakan impor daging kerbau adalah faktor belum tersosialisasinya secara masif di beberapa pusat pembelanjaan rakyat atau pasar sehingga yang terjadi adalah banyaknya Masyarakat yang tidak mengetahui daging kerbau. Dalam hal ini Perum Bulog seyogyanya dapat menerapkan kebijakan praktis sebagai berikut:

- a. Perum Bulog kota Bandung dapat membangun koordinasi yang lebih masif dengan para distributor, supplier atau pedagang pasar untuk bisa mensosialisasikan kebijakan ini.
- b. Perum Bulog juga dapat membangun koordinasi dengan disperindag untuk bisa mengontrol harga daging kerbau di pasaran karna sudah banyak para pedagang yang mengatakan daging kerbau menjadi daging sapi di pasaran.

### **Saran Kebijakan**

Mengingat Perum Bulog kota Bandung adalah sebagai penanggung jawab wilayah maka peneliti menyarankan kedepannya Perum Bulog kota Bandung harus memiliki relasi di setiap bidang untuk mewujudkan kedaulatan pangan yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Nugroho, Riant. 2003 *KEBIJAKAN PUBLIK* Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta, PT Alex Media Computindo.
- Winarno, Budi. 2016 *Kebijakan Publik Era Globalisasi Teori, Proses dan Study Kasus Komparatif*. Yogyakarta, CAPS (Center for Academic Publising Service)
- Atmosudiro, Prajudi. 1982. *Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Handayaniingrat, Soewarno. 1995. *Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta. Gunung Agung.
- Dye, Thomas R. 2002. *Implementation and Public Policy*. Mc Graw Hill Book Company
- Kasim, M. 1994. *Analisis Kebijakan Negara*. Jakarta: Erlangga
- Nazi, Mohammad, 2011. *Metode Penelitian*. Bogm : Ghalia Indonesia.
- Paolong, Harbani. 2008. *Teori Admnistrasi Publik*, Bandung : Alfabeta
- Suyatna, Uyat. 2009. *Kebijakan Publik (Perumusan Implementasi dan Evaluasi)*. Bandung : Kencana Utama.
- Wibawa, Purbokusumo dan Pramusinto, *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta : PT. Grafindo Persada, 1994.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Medpress.
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2018. Sapi potong impor Tersedia pada : <http://www.bps.go.id/>
- Destiarni RP. 2016. *Analisis permintaan daging sapi impor Indonesia [tesis]*. Bogor (IDN): Institut Pertanian Bogor.
- Dirgantoro A. 2004. *Strategi pengenaaan tarif impor daging sapi dan kesejahteraan masyarakat*. Sekolah Pascasarjana IPB.

- [Ditjenak] Direktorat Jederal Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2017. Statistika peternakan dan kesehatan hewan. Jakarta (IDN).
- [FAO] Organisasi Pangan dan Pertanian. 2018. Impor sapi pembibitan Indonesia. [diunduh pada 27 April 2019]. Tersedia pada : <http://www.fao.org/faostat/en/#data/TA>
- Hanum TA., & Wiwin S. 2016. Analisis impor daging sapi di Indonesia tahun 2000 – 2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* 7(8): 1737 – 1766.
- Ilham N. 1998. Penawaran dan permintaan daging sapi di Indonesia: suatu analisis simulasi [tesis]. Bogor (IDN): Institut Pertanian Bogor.
- Ilham N. 2006. Analisis sosial ekonomi dan strategi pengelolaan swsembada daging 2010. *Analisis Kebijakan Pertanian* 4(2): 131 – 145.
- Kariyasa K. 2004. Analisis penawaran dan permintaan daging sapi di Indonesia sebelum dan saat krisis ekonomi: suatu analisis penilaian swasembada daging sapi 2005. *Jurnal SOCA* 4(3): 283 – 293.
- [Kementan] Kementerian Pertanian. 2017a. Inovasi teknologi pendukung siwab. Jumpa pers. [diunduh pada 10 Oktober 2018] Tersedia pada: <https://peternakan.litbang.pertanian.go.id/fullteks/press-release/press-release-siwab-balitnak.pdf>
- [Kementan] Kementerian Pertanian. 2017b. Pandangan Komoditas Pertanian Subsektor Peternakan Daging Sapi. Jakarta: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Kementerian Pertanian.
- [Kemenkeu] Kementerian Keuangan. 2017. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Kerjasama ASEAN-Australia-Selandia Baru Free Trade Area.
- Kusriatmi. 2014. Dampak kebijakan swasembada daging sapi terhadap kinerja subsektor peternakan di Indonesia [disertasi]. Bogor (IDN): Institut Pertanian Bogor.
- Kusriatmi, Rina O, Yusman S. 2014. Analisis Pengaruh Kebijakan Pembatasan Impor Daging Sapi Terhadap Swasembada Daging Sapi Di Indonesia. *Jurnal ISSAAS* 20 (1): 115 – 130.
- Koutsoyiannis A. 1977. Teori Ekonometrika. Edisi kedua. New York (AS): Harper and Row Publisher Inc.

- Marhendra AVH, Zainul A, dan Yusri A, 2014. Analisis dampak penerapan kuota impor terhadap kinerja perusahaan (studi kasus pada PT. Great Giant Livestock, Lampung Tengah-Lampung. *Jurnal Administrasi Bisnis*: 13(1).
- Marsh JM. 1994. Memperkirakan respon pasokan antarwaktu di pasar daging sapi makan. *Jurnal Ekonomi Pertanian Amerika* 71: 444-453.
- Pindyck RS dan Rubinfeld DL. 1998. *Model Ekonometrika dan Prakiraan Ekonomi*. Edisi keempat. Singapura: McGraw-Hill.
- Priyanto D. 2003. Evaluasi kebijakan impor daging sapi dalam rangka proteksi peternak domestik: analisis penawaran dan permintaan [tesis]. Bogor (IDN): Institut Pertanian Bogor.
- Pulungan RE. 2014. Dampak kebijakan Indonesia membatasi kuota impor daging sapi dari Australia. *JOM FISIP* 1(2).
- Purba HJ. 2018. Dampak faktor eksternal dan internal terhadap pasar minyak nabati dunia dan biodiesel Indonesia [disertasi]. Bogor (IDN): Institut Pertanian Bogor.
- Rudatin A. 2016. Analisis Impor Daging Sapi Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pasar Berkembang* 8(1): 65 – 75.
- Rusastra IW. 2014. Perdagangan ternak dan daging sapi: rekonsiliasi kebijakan impor ternak dan revitalisasi pemasaran domestik. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. 32(1): 59 – 71.
- Sitepu RK., dan Sinaga BM. 2018. Aplikasi Model Ekonometrika: Estimasi, Simulasi dan Peramalan Menggunakan Program SAS. Bogor: IPB Press.
- Sukanata IW. 2008. Dampak kebijakan kuota perdagangan terhadap penawaran dan populasi sapi serta kesejahteraan peternak di Provinsi Bali [tesis]. Bogor (IDN): Institut Pertanian Bogor.
- Tennisanna VT, Mohammad MR, Rasheda K. 2016. Pasar Daging Sapi dan Jeroan di Indonesia-Evaluasi Kebijakan Perdagangan Impor. *Jurnal Asia Profil* 44 (3): 199-208.
- Tseuoa T. 2011. Dampak Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN Australia dan Selandia Baru pada Industri Daging Sapi di Indonesia [tesis]. Bogor (IDN): Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Tseuo T. Yusman S, dan Dedi BH. 2012. Dampak Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN Australia dan Selandia Baru terhadap Industri Daging Sapi di Indonesia. Jurnal ISSAAS 18 (2):70 – 80.